BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banyak sekali beredar isu-isu sosial yang kompleks, penting untuk memahami konteks dan dinamika yang menyertainya agar dapat memberikan solusi yang efektif. Salah satu topik yang sering memicu perdebatan dan memerlukan perhatian mendalam adalah prostitusi, terutama di kota-kota besar di seluruh dunia. Di pusat-pusat urban yang padat dan beragam, prostitusi sering kali menjadi manifestasi dari masalah-masalah sosial yang lebih luas, termasuk ketidaksetaraan ekonomi, kemiskinan, dan kurangnya akses terhadap pendidikan dan peluang kerja. (Alunaza et al., 2022). Fenomena ini tidak hanya mencerminkan tantangan individu, tetapi juga menggambarkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi yang lebih besar yang ada di masyarakat perkotaan. (Warsilah, 2015)

Prostitusi adalah praktik yang melibatkan pertukaran layanan seksual untuk imbalan finansial atau barang, (Roem, 2014). dalam konteks sosial, prostitusi sering kali terkait dengan masalah kemiskinan, ketidaksetaraan gender, dan kurangnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak. Banyak individu yang terlibat dalam prostitusi berasal dari latar belakang yang kurang beruntung, dan mereka sering kali terjebak dalam siklus kemiskinan yang sulit untuk dipecahkan. Masalah prostitusi itu sangat rumit dan melibatkan banyak aspek, jadi perlu perhatian khusus dari pemerintah. Prostitusi bukanlah masalah baru,

ini sudah ada sejak lama dan terus ada dengan bentuk yang berbeda seiring waktu. (Marreta, 2017)

Beberapa faktor yang mendorong seseorang memilih menjadi pekerja seks antara lain masalah ekonomi, kemalasan, dan pendidikan yang rendah. Mereka yang memilih jalur ini sering kali ingin hidup glamor tanpa mau bekerja keras. Mereka menggunakan tubuh dan penampilan sebagai cara praktis untuk mendapatkan uang. Selain itu, keterbatasan pengetahuan membuat mereka sulit melihat masa depan, sehingga memilih cara cepat untuk mendapatkan uang. Gaya hidup bebas juga bisa membuat seseorang terjebak dalam prostitusi, terutama jika tidak ada pengawasan dari keluarga. Faktor lain yang berbahaya adalah tidak pedulian, yang sering membuat gadis-gadis muda terlibat dalam hubungan seks yang tidak sehat, merasa kurang percaya diri, dan akhirnya memilih prostitusi. Kecewa dengan pasangan bahkan bisa menyebabkan seseorang bunuh diri. Selain itu, kurangnya pemahaman agama juga berperan penting. Penanaman nilai-nilai agama dalam keluarga sangat penting, karena pemahaman agama yang baik dapat mencegah perilaku tercela, sedangkan pemahaman agama yang lemah bisa mendorong seseorang melakukan hal-hal yang tidak baik, termasuk prostitusi. (Muda et al., 2023)

Hal ini jika di biarkan terus menerus maka dapat menimbulkan dampak negatif seperti permasalahan kesehatan, Penyakit menular seksual (PMS) dapat berdampak negatif pada kesehatan, melemahkan sistem kekebalan tubuh, serta meningkatkan risiko infeksi, penyakit, kanker, dan komplikasi lainnya. Seorang wanita pekerja seks komersial yang berhubungan seks dengan beberapa berisiko

tinggi terkena PMS. Dengan semakin maraknya prostitusi yang tidak terkontrol, risiko terbesar yang ditakutkan adalah penularan virus HIV/AIDS. Kemudian permasalahan konflik sosial Masalah seperti seperti perkembangan anak yang terganggu, penyebaran penyakit menular yang berbahaya, serta masalah dalam keluarga seperti suami yang terlibat dalam judi, narkoba, dan kegiatan negatif lainnya. (Ampang et al., 2024)

Di Indonesia, prostitusi menjadi isu yang semakin mendapat perhatian, terutama di kota-kota besar. Berbagai upaya penertiban telah dilakukan oleh pemerintah daerah, namun sering kali menemui kendala seperti kurangnya dukungan masyarakat, stigma sosial, dan keterbatasan sumber daya. Penting untuk memahami dinamika prostitusi dalam konteks lokal, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keberlangsungan praktik ini dan strategi penertiban yang diterapkan. (Pratiwi, 2022). Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menciptakan keamanan kota dengan mengatasi masalah prostitusi secara menyeluruh. Ini melibatkan penguatan penegakan hukum, peningkatan dukungan masyarakat, dan penyediaan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan kebijakan yang efektif. Pemerintah juga perlu berperan dalam mengurangi stigma sosial dan membangun kesadaran hukum untuk memastikan bahwa setiap langkah penertiban dapat berjalan dengan baik, sehingga tercipta lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh warga kota.

Dalam hal ini, Kota Jambi juga mengalami fenomena terkait prostitusi yang sering kali sulit diatasi. Payo Sigadung atau sering di sebut Pucuk oleh masyarakat setempat sebagai salah satu kawasan yang dikenal dengan aktivitas

prostitusi menghadapi tantangan besar dalam upaya penertiban dan pengendalian. (JPNN.com, 2024). Yang menjadi masalah Payo Sigadung ini sidah di tutup sejak 2014 lalu. (Tribunjambi, 2021), Namun pada kenyataannya sampai sekarang masih banyak praktik prostitusi yang masih berlangsung sampai sekarang. (Metrojambi, 2024), Di Kota Jambi, prostitusi menimbulkan berbagai dampak negatif yang signifikan, mulai dari meningkatnya risiko penyebaran penyakit menular seksual dan gangguan terhadap keamanan hingga penurunan citra kota dan kualitas hidup masyarakat.

Pada tahun 2014, pemerintah Kota Jambi sudah meluncurkan rencana untuk menutup lokalisasi Payo Sigadung sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi masalah sosial dan kesehatan yang terkait dengan praktik prostitusi. Penutupan ini diharapkan dapat mengurangi kejahatan dan memperbaiki citra daerah. Namun, meskipun deklarasi penutupan dilakukan, lokalisasi tersebut masih beroperasi hingga kini, disebabkan oleh faktor-faktor seperti ketidakpuasan penghuni yang menggelar aksi protes, kebutuhan ekonomi masyarakat yang bergantung pada pekerjaan di lokalisasi, serta tantangan dalam penegakan hukum yang sering kali menemui kendala di lapangan. (Liputan6, 2014)

Prostitusi sering kali mengarah pada masalah kesehatan masyarakat, menciptakan area-area yang dikenal sebagai pusat aktivitas ini dan merusak suasana lingkungan. Selain itu, fenomena ini memperburuk kemiskinan dan kekurangan peluang kerja, yang memperkuat siklus ketidakmampuan ekonomi di kalangan individu dan keluarga. Pemerintah harus segera menangani permasalahan ini karena dampak prostitusi yang luas mempengaruhi kesehatan

masyarakat, ketertiban sosial, dan perkembangan ekonomi kota secara keseluruhan. hal ini sangat perlu di perhatikan Pemerintah untuk tetap terus melakukan penertiban kawasan prostitusi agar tidak ada lagi praktik prostitusi yang dapat menimbulkan berbagai masalah. (MADA et al., 2017)

Upaya preventif dan represif dari pemerintah telah dilakukan untuk mencegah atau mengurangi perkembangan pekerja seks komersial sebanyak mungkin. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak sosial dari pelacuran, serta pentingnya mempertahankan moralitas dan etika dalam masyarakat, melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku pelacuran dengan memberikan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Daerah (Badri et al., 2024). Hal ini penting karena praktik prostitusi di masyarakat dapat menimbulkan dampak negatif. Di Kota Jambi, pemerintah telah menerbitkan peraturan daerah, yaitu Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 tentang pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila. Setelah peraturan ditetapkan, penting agar diikuti dengan tindakan nyata untuk memastikan keberhasilannya.

Satuan Polisi Pamong Praja, dan kepolisian berkolaborasi erat dalam upaya penertiban kawasan prostitusi di Payo Sigadung. Satpol PP menyediakan informasi dan data kepada kepolisian terkait lokasi-lokasi yang dianggap berpotensi menjadi tempat kegiatan prostitusi, serta identifikasi pelaku prostitusi yang sering beroperasi di daerah tersebut. Kerja sama ini memungkinkan Satpol PP, dan kepolisian untuk bersama-sama menertibkan kawasan prostitusi beserta pengusaha yang mendukung praktik tersebut di wilayah Payo Sigadung. Dengan

demikian, tugas dari instansi ini adalah sebagai fasilitator dan penggerak dimana mereka memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan ketertiban umum di daerah tersebut agar tidak ada lagi praktik prostitusi di wilayah tersebut. (Muntazza et al., 2023)

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu, Pertama, Prostitusi ini banyak sekali di lakukan oleh para Remaja seperti pada penelitian oleh Suci Marliana, Arri Handayani, Siti Fitriana, dalam penelitiannya menunjukkan faktor yang mempengaruhi remaja melakukan prostitusi yaitu faktor ekonomi dan faktor tuntutan gaya hidup. Faktor ekonomi terdiri dari adanya keinginan mengumpulkan kekayaan dan memenuhi kebutuhan materi. Faktor tuntutan gaya hidup terdiri dari adanya suatu hal yang ingin ditiru dengan alasan rasa penasaran. Remaja harusnya tetap dalam perlindungan orangtua dan keluarga supaya tidak mudah terjerumus dalam hal- hal yang negatif. (Marliana et al., 2018)

Penelitian Oleh Dyah Putri Setiawati, Ronni Juwandi, Dinar Sugiana Fitrayadi Universitas, dalam Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan rehabilitasi pekerja seks komersial di Dinas Sosial dan persepsi masyarakat di lingkungan Cipocok Jaya.yaitu terdapat kegiatan rehabilitasi pekerja seks komersial berupa keterampilan tata boga, sosialisasi bahaya seks bebas, dan kegiatan kerohanian. Persepsi masyarakat yaitu tentang ramainya prostitusi dan pengetahuan masyarakat tentang program rehabilitasi. Hasil penyebaran angket yang berisi 20 pernyataan adalah mayoritas masyarakat terganggu kebereadaan PSK karena mendatangkan penyakit menular seksual dan setuju program

rehabilitasi ini untuk jangka panjang supaya bisa mengurangi populasi PSK di Kota Serang.Penelitian ini jelas menunjukkan bahwa masyarakat terganggu akibat keberadaan PSK yang dapat menimbulkan Penyakit menular seksual. (Setiawati et al., 2022)

Selain itu, Prostitusi tidak hanya di lakukan pada satu tempat saja namun praktik ini juga di lakukan dengan media online berupa berbagai aplikasi seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Natasya, Kusyogo, Aditya, pada penelitian ini menunjukkan bahwa semua subjek adalah pekerja seks komersial yang dapat diakses melalui internet. Mereka umumnya mengetahui prostitusi online dari teman dekat dan memiliki sikap negatif terhadap pekerjaan mereka. Sebagian besar ingin diakui secara sosial dan tidak bisa melepaskan gaya hidup mewah, namun tidak ingin dikenal sebagai pekerja seks. Semua subjek menunjukkan niat positif sejak pertama kali mengenal prostitusi online. (Natasya et al., 2017)

Kota Serang juga mengalami masalah prostitusi yang dimana wilayah alun alun di salah gunakan seperti pada penelitian oleh Sherly Melinda, Delly Maulana, Fikri Habibi, Pada Penelitian ini membahas bagaimana Alun-alun Kota Serang, sebagai ruang terbuka publik, disalahgunakan oleh prostitusi untuk transaksi. Kondisi ini memicu Pemerintah Kota Serang untuk mengambil langkah-langkah untuk mengatasi penyalahgunaan tersebut. Karena pemerintah kesulitan menangani masalah prostitusi secara langsung, mereka bekerja sama dengan Ormas Islam yang dianggap dapat membantu dalam pemberantasan prostitusi di area tersebut. Namun, kolaborasi ini belum sepenuhnya efektif. Ada kendala dalam komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dan Ormas Islam,

yang menghambat efektivitas upaya bersama mereka dalam memberantas prostitusi di Alun-alun Kota Serang. (Melinda et al., 2020)

Penelitian selanjutnya yaitu oleh Mia Amalia, yaitu pada penelitiannya adalah Fenomena prostitusi merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang sangat sulit diatasi, sering kali didorong oleh faktor ekonomi dalam masyarakat. Prostitusi belum dapat diberantas sepenuhnya dan menimbulkan ancaman terhadap moralitas seksual, kehidupan rumah tangga, kesehatan, dan kesejahteraan wanita. Salah satu masalah terkait prostitusi adalah kedatangan turis dari Timur Tengah ke Kampung Arab di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, yang memicu transaksi seks antara turis Arab dengan pekerja seks komersial (PSK) domestik dari Bogor dan Cianjur, serta PSK dari Maroko, yang dikenal sebagai Maghribi. Pemerintah perlu lebih aktif mencari solusi untuk masalah ini dan berani memberantas prostitusi di area tersebut. Jika tidak, budaya Indonesia berisiko terkikis, dan prostitusi bisa berkembang menjadi masalah sosial yang lebih besar, terkait dengan etika moralitas bangsa. (Mia Amalia, 2016)

Prostitusi juga sangat dikaitkan erat dengan agama, hal ini dibahas oleh Ghufron Hamzah dalam penelitiannya yaitu Dalam agama Islam, prostitusi pelacuran merupakan salah satu perbuatan zina. Perbuatan yang dilarang dalam agama Islam dan ada sangsi hukum bagi pelakunya. Tindakan prostitusi ini juga termasuk penyimpangan sosial dan banyak dampak negatif yang timbul dari penyimpangan ini. Bentuk lain penyimpangan sosial yang sangat dekat dengan prostitusi adalah trafficking atau perdagangan manusia, dimana mayoritas korban trafficking adalah perempuan atau anak-anak yang dieksploitasi secara seksual.

Tulisan ini akan menguraikan kedua fenomena tadi dari sudut pandang al Qur'an, dengan mengetengahkan beberapa ayat yang berbicara tentang prostitusi dan trafficking. (Hamzah, 2018)

Kemudian Penelitian selanjunya yaitu oleh Agus Gunawan, Rahmatul Hidayati, Sunardi dalam penelitiannya membahas beberapa isu, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku prostitusi, tantangan yang dihadapi oleh petugas Satpol PP dalam menangani prostitusi, serta langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Lumajang dalam menangani prostitusi anak di Desa Klumprit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik prostitusi di Desa Klumprit dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Pemerintah Kabupaten Lumajang berusaha mengubah kawasan prostitusi menjadi "Kampung Anggur" dengan memberikan pelatihan dan peluang usaha baru. Namun, upaya ini menghadapi kendala seperti kurangnya pengawasan masyarakat, pendidikan formal yang rendah, dan gangguan dari lokal. (Agus Gunawan, Rahmatul Hidayati, 2024)

Isu prostitusi ini tidak ada habisnya untuk dibahas, maka dari itu pemerintah desa memiliki peran dalam pencegahan dan penanggulangan penyebarluasan Pekerja Seks Komersial (PSK) di eks lokasi prostitusi Sumber Loh, ini bahas dalam penelitian oleh Zebfri Bahril Ulum, Sri Wilujeng, Leni Vitasari.dalam penelitiannya yaitu Pemerintah desa Sumber Loh telah melaksanakan beberapa upaya untuk mencegah dan menangani PSK, termasuk kewajiban lapor 1 x 24 jam kepada RT dan pelaporan data bulanan ke pemerintah desa, serta kegiatan dakwah dan pelatihan untuk warga desa Benelan Kidul. Inisiatif yang masih

direncanakan mencakup pengadaan wisata kuliner dan revitalisasi sport center untuk mengurangi prostitusi. Namun, faktor internal dan eksternal yang menghambat efektivitas peran pemerintah masih ditemukan. (Zebfri Bahril Ulum, Sri Wilujeng, 2024)

Tidak hanya peran peran pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan penyebarluasan Pekerja Seks Komersial (PSK),namun juga lembaga pemerintah yang melaksanakn fungsi rehabilitasi sosial, pada penelitian oleh Lady Putri Afwidi dalam penelitiannya yaitu salah satu langkah intervensi yang dapat diterapkan adalah melalui rehabilitasi sosial. Tujuan dari rehabilitasi sosial ini adalah untuk memulihkan fungsi sosial individu dalam masyarakat serta memberikan keterampilan dan keahlian kepada agar mereka tidak kembali ke dunia prostitusi. Rehabilitasi bagi tuna susila tidak hanya mencakup mereka yang terlibat langsung dalam prostitusi, tetapi juga beberapa orang yang tertangkap saat berada di luar rumah setelah jam malam. (Afwidi, 2022)

Masalah ini juga terus menerus juga terjadi karena pengaruh internet terhadap bisnis prostitusi, hal ini di bahas pada penelitian oleh Lukman Nugraha Pratama, pada penelitiannya yaitu Internet telah memperburuk masalah prostitusi dengan memperkenalkan dan memperluas metode baru seperti video call seks (VCS), yang tidak hanya memicu kecemburuan sosial tetapi juga meningkatkan skala bisnis prostitusi melalui inovasi digital. Penggunaan teknologi ini menciptakan lingkungan sosial yang lebih tidak stabil di Kabupaten Ngawi, yang pada gilirannya memperburuk masalah kemiskinan dan isolasi sosial. Dengan kemudahan akses dan perluasan jangkauan melalui platform digital, risiko sosial

meningkat, menghambat upaya untuk menangani isu-isu mendasar yang terkait dengan kemiskinan dan keterasingan sosial di wilayah tersebut. (Pratama, 2023)

Selanjutnya pada penelitian yang berjudul Implementasi Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.23 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Praktek Seks Komersial (Studi Kasus Warung Kopi Pangku Desa Bukit Raya Kabupaten Kutai Kartanegara), pada penelitian tersebut bahwa Implementasi Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No. 23 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Prostitusi di Warung Kopi Pangku belum efektif karena beberapa kendala, seperti: 1) Prostitusi yang dipengaruhi faktor kemiskinan, pengangguran, dan lingkungan. 2) Ketidakjelasan dalam Perda terkait pihak berwenang dan tidak adanya tim khusus. 3) Kurangnya koordinasi antara pemerintah kecamatan dan kabupaten. 4) Perlindungan dari kelompok preman yang menghalangi tindakan pemerintah. 5) Minimnya pengawasan yang menyebabkan praktik prostitusi kembali muncul setelah penertiban bangunan ilegal. (Ayu Sri Astuti, 2023)

Kemudian Prostitusi menjadi masalah sosial yang masih terjadi di masyarakat, termasuk di Kabupaten Lamongan. Meskipun sudah ada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Pelacuran, praktik prostitusi di Desa Banjarwati, Kecamatan Paciran, masih berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan tersebut belum sepenuhnya diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Lamongan dalam menerapkan peraturan tersebut dan langkah-langkah yang diambil di Desa Banjarwati, dimana hasil penelitianya menyimpulkan Praktik

pemberantasan prostitusi pekerja seks komersial di Kabupaten Lamongan, khususnya di Kecamatan Paciran, Desa Banjarwati, belum berjalan dengan efektif. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa prostitusi masih terjadi di wilayah tersebut, dan meskipun langkah-langkah telah diambil oleh aparat penegak hukum untuk menerapkan Peraturan Daerah, hasilnya belum maksimal. (Ayu Sri Astuti, 2023)

Di antara penelitian penelitian terdahulu belum ada yang membahas bagaimana strategi untuk menertibkan kawasan prostitusi di Payo Sigadung, Prostitusi yang terjadi di Payo Sigadung berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat terlebih lagi dengan meningkatnya angka HIV di kota Jambi (Jambione.com, 2024). Jika praktik prostitusi masih berlangsung, dampaknya terhadap marwah atau nama baik kota bisa sangat merugikan. Aktivitas ini dapat mencoreng citra kota sebagai tempat yang tidak aman dan kurang teratur, mengurangi daya tariknya bagi investor dan pengunjung. Untuk menjaga dan memperbaiki marwah Kota Jambi, penting untuk menangani isu ini secara efektif dan berkelanjutan.prostitusi dapat merusak struktur keluarga dan meningkatkan ketidakamanan sosial. Penelitian ini penting untuk melihat bagaimana strategi penertiban saat ini dapat mengurangi dampak-dampak negatif ini. Dengan memberikan analisis mendalam mengenai strategi penertiban yang diterapkan, penelitian ini akan membantu pemerintah dan peneliti lain dalam merancang solusi yang lebih baik untuk masalah sosial ini.terkait hal tersebut maka dari itu peneliti tertarik untuk mengambil judul **"Implemetasi Strategi Penertiban Kawasan Prostitusi Payo Sigadung Kota Jambi"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi strategi penertiban prostitusi di Payo Sigadung?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari penetapan strategi tersebut?

1.3 Tujuan Masalah

Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis implementasi strategi penertiban prostitusi di Payo Sigadung
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari penetapan strategi tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis
    a. Penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi pemerintah dan lembaga penegak hukum dalam menerapkan strategi penertiban yang lebih efektif. Temuan dari penelitian bisa digunakan untuk menyesuaikan dan meningkatkan kebijakan yang ada agar lebih sesuai dengan kondisi lokal.

b. Dengan mengidentifikasi strategi yang berhasil dan yang tidak, penelitian ini membantu dalam merancang pendekatan penertiban yang lebih efektif. Ini bisa mencakup metode operasional, penanganan konflik, dan teknik mitigasi dampak sosial.

c. Penelitian dapat memberikan rekomendasi tentang bagaimana meningkatkan kerjasama antara berbagai lembaga, seperti kepolisian, dinas sosial, dan pemerintah kota. Ini akan mempermudah pelaksanaan strategi penertiban dan memastikan sinergi antara berbagai pihak.

2. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini dapat menambah wawasan teoritis tentang bagaimana strategi penertiban diterapkan dalam konteks sosial yang spesifik. Ini bisa memperkaya literatur tentang penegakan hukum, penertiban sosial, dan pengelolaan masalah prostitusi.

b. Temuan penelitian dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori tentang penertiban sosial dan manajemen masalah sosial. Ini membantu dalam memahami mekanisme dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan strategi penertiban.

c. Penelitian ini dapat menguji dan mengevaluasi teori-teori tentang implementasi kebijakan, termasuk teori-teori tentang kepemimpinan, manajemen perubahan, dan efektivitas kebijakan publik dalam konteks masalah sosial yang kompleks.

1.5 Landasan Teori

Teori berfungsi sebagai panduan bagi peneliti dalam menganalisis masalah yang muncul di lapangan. Berikut adalah teori yang digunakan oleh peneliti untuk menyelesaikan masalah tersebut:

1.5.1 Manajemen Strategi

Manajemen strategis adalah proses perencanaan, pemantauan, analisis, dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap kebutuhan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Perubahan dalam lingkungan bisnis memerlukan organisasi untuk secara rutin menilai strategi mereka agar tetap berhasil. Proses ini membantu organisasi memahami posisi mereka saat ini, merancang strategi, mengimplementasikannya, dan menilai efektivitas dari strategi yang diterapkan. Terdapat lima strategi dasar dalam manajemen strategis, yang dapat bervariasi dalam penerapannya sesuai dengan kondisi lingkungan. (Paramansyah, 2022)

Manajemen strategis adalah proses yang dilakukan oleh manajer untuk memastikan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Proses ini mencakup mengamati lingkungan sekitar perusahaan, merumuskan strategi jangka panjang, menerapkan rencana tersebut, serta mengevaluasi dan mengontrol hasilnya. (Nazarudin, 2018). Fokus utama dari manajemen strategis adalah memahami peluang dan ancaman di pasar serta menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan. Dulu dikenal sebagai kebijakan bisnis, manajemen strategis mencakup perencanaan dan strategi untuk mencapai tujuan jangka panjang. (Sudiantini & Hadita, 2022)

Manajemen strategi terdiri dari tiga proses utama :

1. Penetapan strategi: Meliputi pengembangan misi dan tujuan jangka panjang, identifikasi peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal, pengembangan berbagai alternatif strategi, dan pemilihan strategi yang tepat untuk diterapkan.
2. Penerapan strategi: Mencakup penetapan sasaran operasional tahunan, penyusunan kebijakan organisasi, motivasi karyawan, dan alokasi sumber daya untuk memastikan implementasi strategi yang efektif.
3. Evaluasi atau kontrol strategis: Melibatkan pemantauan hasil dari perencanaan dan penerapan strategi, pengukuran kinerja individu dan organisasi, serta pengambilan langkah-langkah perbaikan jika diperlukan. (Ahmad, 2023)

1.5.2 Manajemen Strategi Sektor Publik

Dalam penerapan Manajemen Strategis, langkah awal yang perlu dilakukan adalah melakukan pemetaan atau analisis situasi, baik dari segi eksternal maupun internal organisasi. Analisis lingkungan eksternal mencakup kajian terhadap faktor-faktor strategis di luar organisasi, yang bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang ada. Terdapat tiga kategori utama yang harus diperhatikan saat melakukan analisis lingkungan eksternal, yaitu:

a. Identifikasi kekuatan, tekanan, dan tren yang biasanya dibagi ke dalam aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum;
b. Pemetaan sumber daya yang dimiliki.

c. Analisis pesaing, baik yang ada maupun yang potensial, serta pemangku kepentingan dan faktor penting lainnya yang memengaruhi persaingan dan kolaborasi.

Selain analisis eksternal, penting juga untuk melakukan analisis lingkungan internal guna mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi. Hal ini mencakup berbagai aspek yang dapat mendukung atau menghambat pencapaian visi dan misi organisasi. Beberapa komponen yang perlu diperhatikan dalam analisis internal meliputi:

a. Kekuatan organisasi.
b. Kelemahan organisasi.
c. Pertanyaan terkait visi dan misi.
d. Kapasitas internal organisasi, yang mencakup program kerja, sumber daya manusia, manajemen dan kepemimpinan, sumber daya fisik, citra organisasi, dan lain-lain.

1.5.3 Implementasi Strategi

Pelaksanaan strategi adalah salah satu tahap krusial dalam proses strategi. Fase ini tidaklah mudah, karena berbagai hambatan, tantangan, dan masalah, baik dari dalam maupun luar, akan muncul. Menurut Hariadi (2005:13), tahap implementasi dianggap sebagai yang paling sulit karena banyaknya faktor yang dapat memengaruhi pelaksanaan di lapangan, yang mungkin tidak sesuai dengan perencanaan awal. Hariadi juga menjelaskan bahwa implementasi strategi melibatkan proses penerapan strategi dan kebijakan melalui pembangunan struktur,

pengembangan program, anggaran, dan prosedur pelaksanaan. (Praminingtyas & Isbandono, 2015)

a. Proses Implemetasi Strategi

Menurut Dirgantoro (2004 : 14) dalam (Praminingtyas & Isbandono, 2015) menyebutkan dalam bukunya manajemen stratejik proses proses manajemen di mana pada tahap implementasi strategi ia mengemukakan beberapa aktivitas atau cakupan kegiatan yang mendapat penekanan anatara lain :

1. Menetapkan tujuan tahunan
2. Menetapkan kebijakan (policy)
3. Motivasi aparatur
4. Mengembangkan budaya pendukung
5. Menetapkan struktur organisasi yang efektif
6. Menyiapkan target
7. Mendayagunakan sistem informasi
8. Menghubungkan kompensasi karyawan dengan performance organisasi

Sementara Dirgantoro mencantumkan delapan kegiatan dalam pelaksanaan strategi, Wheelen & Hunger (2003:297-335) memiliki pandangan yang berbeda. Mereka menyatakan bahwa untuk memahami proses implementasi, perlu diperhatikan tiga aspek utama (Hunger & Wheelen, 2000), yaitu:

a. Aktor Pelaksana Strategi

Aktor strategi tidak hanya mencakup individu yang berada di dalam organisasi, tetapi juga mereka yang berkontribusi dan berperan aktif dalam pelaksanaan strategi. Meskipun dalam perusahaan besar pelaksana strategi sering

kali terbatas pada anggota organisasi saja, setiap orang di dalam organisasi memiliki peranan penting dalam proses tersebut. Namun, pada kenyataannya, jumlah pihak yang terlibat dalam merumuskan implementasi sering kali lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pelaksana strategi. Setiap pelaksana strategi menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya masing-masing. Oleh karena itu, peran manajer operasional dalam mengawasi pelaksanaan strategi oleh setiap anggota organisasi sangatlah penting.

b. Pelaksaan Strategi

Dalam pelaksanaan strategi, pengembangan program dibuat dengan tujuan agar strategi yang telah dirancang dapat diterapkan secara efektif dalam bentuk tindakan yang nyata (action-oriented). Program ini bertujuan untuk mendorong organisasi agar mencapai tujuan yang lebih baik dari sebelumnya. Pengembangan program harus didukung oleh anggaran, yang berfungsi sebagai verifikasi akhir terhadap kelayakan strategi yang dipilih. Setelah program direncanakan, prosedur akan disusun untuk memperjelas tugas, fungsi, dan tanggung jawab setiap individu dalam organisasi.

1. Program: Merupakan pernyataan tentang aktivitas atau langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan secara spesifik. Program ini mencakup restrukturisasi perusahaan, perubahan budaya internal, atau pelaksanaan penelitian baru.
2. Anggaran: Dinyatakan dalam bentuk dana, anggaran memberikan rincian biaya untuk setiap program yang memungkinkan manajemen

merencanakan, mengendalikan tindakan, dan mengevaluasi kinerja keuangan yang diharapkan.

3. Prosedur: Juga dikenal sebagai Standard Operating Procedure, prosedur adalah serangkaian langkah atau teknik yang terstruktur dengan jelas, menggambarkan cara detail untuk menyelesaikan suatu tugas.

c. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

1. Pengorganisasian

Pengorganisasian berkaitan dengan cara sebuah organisasi menyusun dan mengelola struktur serta sumber daya manusianya untuk mencapai tujuannya. Penetapan struktur organisasi merupakan langkah penting dalam mengatur berbagai aktivitas dan sumber daya manusia dalam organisasi besar, memastikan bahwa semua pekerjaan dapat dilakukan dengan efektif. Struktur organisasi harus disesuaikan dengan lingkungan yang terus berubah dan berkembang, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi strategi organisasi.

2. Penataan Staff (Staffing)

Beberapa perubahan dalam organisasi mungkin memerlukan penambahan orang-orang dengan kompetensi baru, pengurangan staf yang tidak memenuhi standar, atau pelatihan ulang bagi karyawan yang ada. Dalam konteks struktur organisasi, prinsip "structure follows strategy" juga berlaku, artinya penataan staf harus mengikuti strategi yang telah ditetapkan. Penataan staf ini dapat mencakup pengurangan atau penambahan pegawai, mutasi, atau pemberhentian pegawai, serta penyesuaian terhadap kompetensi yang dimiliki oleh setiap pegawai. Selain itu,

pendidikan dan pelatihan diperlukan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian pegawai yang mendukung pelaksanaan strategi organisasi.

3. Pengarahan

Implementasi juga melibatkan pengarahan staf agar dapat memanfaatkan kompetensinya secara optimal untuk mencapai tujuan perusahaan. Tanpa pengarahan yang jelas, staf cenderung melaksanakan tugas sesuai dengan cara pandang pribadi mereka. Pengarahan ini dapat berupa kepemimpinan dari manajemen, komunikasi tentang norma-norma perilaku sesuai budaya perusahaan, atau pembentukan kesepakatan di antara pegawai untuk menerjemahkan strategi menjadi tindakan konkret.

1.6 Kerangka Pemikiran

Adapun Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini yaitu :

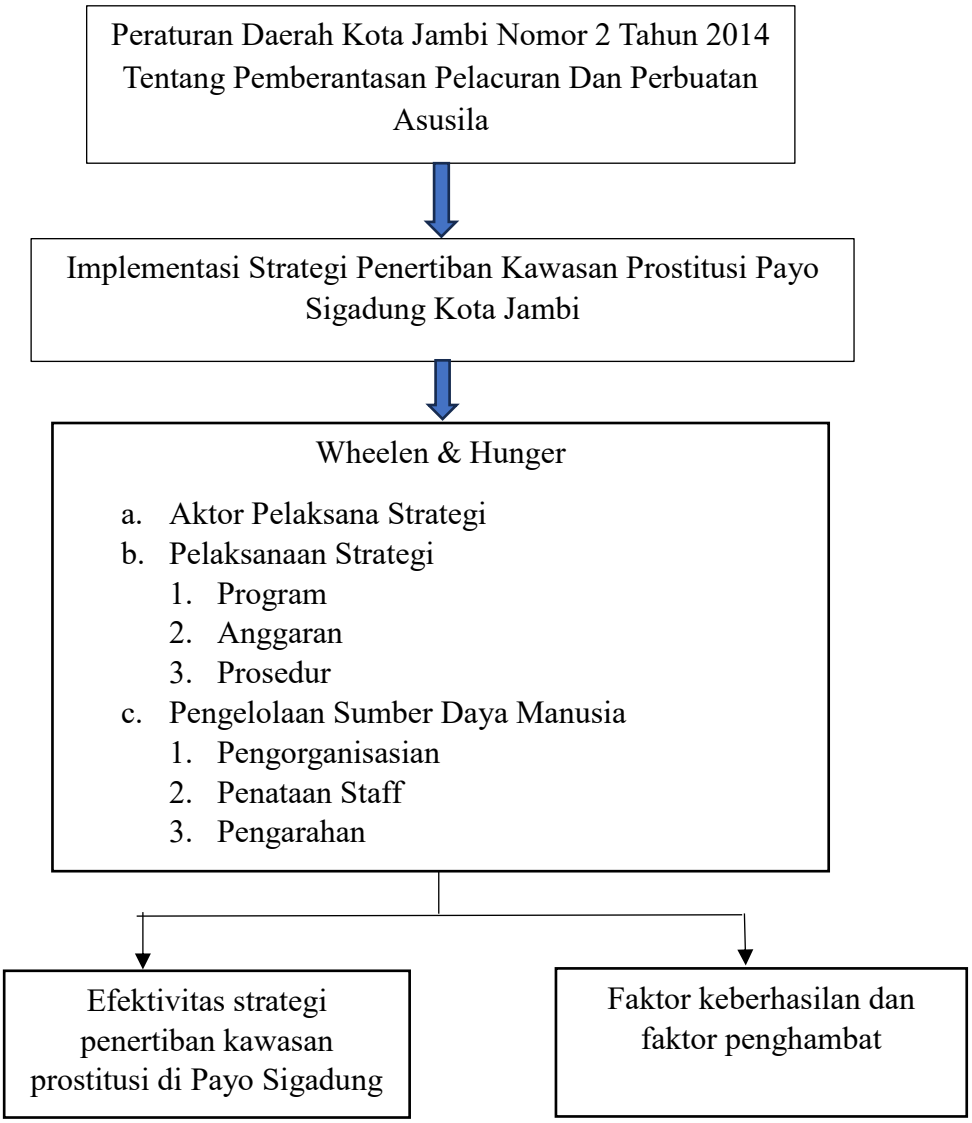

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pendekatan ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan penggunaan tertentu. (Assyakurrohim et al., 2022) Pendekatan ilmiah mencakup ciri-ciri rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti penelitian dilakukan dengan cara yang logis dan dapat dipahami oleh akal manusia. Empiris berarti metode yang digunakan dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat melihat dan memahami cara tersebut. Sistematis berarti proses penelitian mengikuti langkah-langkah yang logis dan terstruktur. (Nasution, 2023)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam tentang bagaimana strategi penertiban diterapkan di kawasan Payo Si Gadung, Kota Jambi. Dengan metode ini, peneliti dapat mengumpulkan data berupa kata-kata, observasi, dan deskripsi yang memberikan gambaran rinci tentang proses implementasi, tantangan yang dihadapi, dan dampak terhadap masyarakat. Pendekatan ini cocok untuk menggali konteks dan nuansa yang mungkin tidak terlihat hanya dari angka, sehingga memberikan wawasan yang lebih lengkap dan jelas tentang efektivitas strategi yang diterapkan.(Nasution, 2023)

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan di gunakan adalah penelitian kualitatif,penelitian kualitatif adalah adalah salah satuprosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang- orang yang diamati.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang pemecahan masalahnya dilakukan dengan menggunakan data empiris.(Saragih et al., 2019)

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada implementasi strategi penertiban di kawasan prostitusi Payo Sigadung, Kota Jambi. Pemilihan kawasan ini didasarkan pada fakta bahwa Payo Sigadung telah lama mengalami kesulitan dalam penertiban, dan belum mencapai tingkat keteraturan yang diharapkan. Kawasan ini merupakan area yang secara khusus menghadapi berbagai tantangan terkait pengelolaan dan penegakan hukum, menjadikannya subjek yang relevan untuk studi ini. Selain itu, penelitian ini juga akan melibatkan berbagai instansi pemerintahan di Kota Jambi yang memiliki peran dalam penertiban kawasan tersebut. Ini termasuk badan-badan yang bertanggung jawab atas kebijakan, penegakan hukum, dan pengawasan, sehingga memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana strategi penertiban dijalankan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

1.7.3 Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi strategi penertiban kawasan prostitusi di Payo Sigadung, Kota Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat strategi yang diterapkan dalam mengatasi masalah prostitusi, serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi tersebut. Selain itu, penelitian ini juga ingin memberikan rekomendasi untuk perbaikan strategi agar lebih efektif dalam meningkatkan ketertiban di kawasan tersebut.

1.7.4 Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data Primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber asli di lapangan. Metode pengumpulan data ini melibatkan observasi langsung, wawancara dengan responden untuk mendapatkan jawaban dari pihak-pihak yang terlibat. (Syafnidawaty, 2020). Dalam penelitian ini, sumber data primer meliputi catatan di lapangan dari hasil wawancara dengan beberapa informan dan hasil dokumentasi serta observasi yaitu pengamatan langsung menggunakan panca indra terkait implementasi strategi satuan polisi pamong praja dalam penertiban kawasan prostitusi di Payo Sigadung Kota Jambi.

b. Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain.data sekunder diperoleh dari literature-literatur, jurnal penelitian,internet dan informasi lain. (Sukmawati et al., 2023). Data sekunder dari penelitian ini bersumber dari hasil studi pustaka yang meliputi buku, artikel, jurnal, berbagai sumber dari internet serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian ini.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Dalam Penelitian ini tehnik yang di gunakan adalah *Purposive sampling*, Purposive sampling adalah metode pemilihan sampel dalam teknik non-random sampling di mana peneliti memilih sampel berdasarkan kriteria khusus yang

relevan dengan tujuan penelitian. Menurut Margono, dalam purposive sampling, pemilihan kelompok subjek dilakukan berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap relevan dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Teknik ini bertujuan untuk memastikan bahwa sampel yang diambil dapat memberikan jawaban yang tepat untuk masalah penelitian. Dua aspek kunci dalam purposive sampling adalah bahwa ini termasuk non-random sampling dan penentuan kriteria khusus oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitian mereka. (Hidayat, 2017)

Peneliti kemudian memilih beberapa informan untuk penelitian ini berdasarkan pertimbangan bahwa orang-orang tersebut dianggap mampu memberikan informasi yang lengkap dan relevan terkait topik penelitian. Pemilihan informan dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan akan memberikan gambaran yang menyeluruh dan akurat mengenai fokus penelitian. Beberapa informan yang dipilih untuk memberikan wawasan dalam penelitian ini antara lain adalah:

a. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi

Satpol PP dipilih sebagai informan karena mereka bertanggung jawab langsung dalam penegakan hukum dan penertiban di lapangan. Sebagai instansi yang menjalankan tugas operasional sehari-hari untuk menegakkan peraturan dan kebijakan, Satpol PP memiliki informasi praktis tentang pelaksanaan strategi penertiban, tantangan yang dihadapi, serta efektivitas tindakan yang diambil. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Subandi selaku Kepala Seksi Penindakan Produk Hukum Daerah di Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Jambi. Wawasan dari Satpol PP membantu memahami bagaimana kebijakan diterjemahkan menjadi tindakan nyata dan bagaimana respons masyarakat terhadap penertiban tersebut.

b. Kepolisian Resor Kota Jambi

Kepolisian dipilih sebagai informan karena mereka memiliki peran kunci dalam penegakan hukum dan pengawasan di lapangan. Polisi terlibat langsung dalam operasional penertiban, penegakan hukum, serta penanganan kasus-kasus terkait prostitusi. Mereka dapat memberikan informasi berharga tentang pelaksanaan strategi penertiban, tantangan hukum yang dihadapi, serta dampak dari tindakan kepolisian terhadap kawasan tersebut. Dalam hal ini peneliti melakukan awancara bersama Bapak Aiptu Dedi selaku anggota Kepolisisan Resor Kota Jambi. Wawasan dari polisi penting untuk memahami bagaimana strategi penertiban dijalankan dari perspektif hukum dan keamanan.

c. Forum RT/RW

Forum RT/RW termasuk masyarakat dipilih sebagai informan karena mereka adalah pihak yang langsung terdampak oleh strategi penertiban. Dalam hal ini Ketua RT 05 Rawasari di pilih sebagai informan. Perspektif masyarakat memberikan wawasan tentang bagaimana penertiban mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka, penerimaan terhadap kebijakan, dan dampak sosial yang dirasakan. Informasi dari masyarakat penting untuk memahami efektivitas strategi dari sudut pandang pengguna dan korban kebijakan, serta untuk mengevaluasi apakah penertiban mencapai tujuan yang diinginkan dan bagaimana perubahannya mempengaruhi komunitas secara keseluruhan.

d. Pekerja Seks Komersial

Pekerja Seks Komersial (PSK) dipilih sebagai informan karena mereka adalah kelompok yang langsung terlibat dan terkena dampak dari strategi penertiban. Dalam hal ini peneliti memilih Nanik sebagai informan. Perspektif dari PSK penting untuk memahami bagaimana kebijakan penertiban mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari, tantangan yang mereka hadapi, dan respons mereka terhadap tindakan penegakan hukum. Informasi dari PSK membantu memberikan gambaran yang lebih lengkap dan realistis mengenai efek kebijakan dari sudut pandang mereka, serta membantu dalam mengevaluasi apakah strategi yang diterapkan efektif dan adil.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian berjudul "Implementasi Strategi Penertiban Kawasan Prostitusi Payo Si Gadung, Kota Jambi," teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara:

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan proses tanya jawab antara peneliti dan responden. Dalam teknik ini, peneliti mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden dan mencatat atau merekam jawaban mereka. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka, di mana peneliti dan responden berinteraksi secara langsung, atau melalui media lain jika diperlukan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara yaitu pertama, membuat janji kepada para informan, kedua peneleti melakukan pertemuan sesuai janji kepada informan dan melakukan wawancara langsung kepada para

informan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan detail tentang topik yang sedang diteliti. (Kamaruddin et al., 2017)

b. Observasi

Observasi adalah metode yang digunakan untuk melihat secara langsung bagaimana strategi penertiban diterapkan di kawasan prostitusi Payo Sigadung. Peneliti melakukan observasi langsung ke Payo Sigadung pada malam hari. Dengan mengamati langsung, peneliti dapat mengumpulkan informasi yang akurat dan mendetail tentang proses penertiban, serta bagaimana perilaku dan interaksi berlangsung di lapangan. Observasi adalah bagian penting dalam penelitian kualitatif. Hasil wawancara bisa jadi kurang tepat jika tidak didukung dengan pengamatan langsung di lapangan. (Moleong, 2007)

c. Dokumentasi:

Untuk mengumpulkan data sekunder yang mendukung penelitian dan memberikan konteks tambahan. Peneliti mengumpulkan dokumen resmi, laporan, dan data terkait dari Satpol PP, dan Polisi. Ini termasuk kebijakan, laporan tahunan, dan dokumen terkait strategi penertiban. Di sini peneliti mendapatkan dokumentasi terkait razia yang di lakukan di lapangan Oleh Satpol PP Kota jambi beserta pihak aparat lain yang terlibat.

d. Studi Literatur:

Untuk memperkaya pemahaman tentang topik dan mendukung analisis data yang dikumpulkan, peneliti mengkaji literatur, jurnal, dan artikel akademik

yang relevan dengan penertiban kawasan prostitusi dan strategi kebijakan publik. (Sijal, 2024)

1.7.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian mengenai implementasi strategi penertiban kawasan prostitusi di Payo Sigadung, Kota Jambi, analisis data dilakukan melalui beberapa tahap penting. analisis data sudah peneliti lakukan semenjak peneliti turun di lapangan,mulai dari wawancara, obervasi dan dokumentasi, kemudian reduksi data di lakukan setelah data wawancara dengan meyederhanakan data agar informasi lebih relevan, kemudian data yang telah di reduksi di lanjutkan kembali melalui penyajian data yaitu di sajikan secara terstuktur dan kemudian setelah data sudah di sajikan secara terstuktur peneliti menarik kesimpulan. dalam analisis data penelitian ini, pendekatan yang diadopsi mengikuti tahapan yang diuraikan oleh Miles dan Huberman.

a. Reduksi Data:

Setelah data dikumpulkan dari wawancara mendalam dan dokumentasi, tahap berikutnya adalah reduksi data. Proses ini mencakup seleksi dan penyederhanaan data untuk menghilangkan informasi yang tidak relevan dan menyoroti data yang paling signifikan dalam konteks strategi penertiban. Data yang relevan kemudian dikategorikan dan dikodekan untuk memudahkan analisis dan pengidentifikasian pola atau tema utama terkait efektivitas strategi penertiban.

b. Penyajian Data:

Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk yang terstruktur, seperti tabel dan grafik, serta deskripsi naratif yang mendalam. Penyajian ini membantu dalam visualisasi dan interpretasi data, memudahkan identifikasi tren dan pola yang berkaitan dengan implementasi strategi penertiban, serta memberikan gambaran yang jelas tentang hasil dan dampak strategi tersebut di lapangan.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi:

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menganalisis data yang telah disajikan untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang efektivitas strategi penertiban. Kesimpulan akhir merangkum temuan utama dan implikasi dari hasil tersebut. Untuk memastikan validitas, kesimpulan diverifikasi dengan triangulasi data dan umpan balik dari responden, serta mengacu pada teori Tindakan Sosial Max Weber untuk memahami bagaimana strategi tersebut mempengaruhi tindakan sosial individu di kawasan tersebut. (Kurniawan & Sarmini, 2022)

1.7.8 Keabsahan data

Dalam penelitian mengenai implementasi strategi penertiban kawasan prostitusi di Payo Sigadung, Kota Jambi, uji keabsahan data dilakukan melalui metode uji kredibilitas atau *credibility*. Uji kredibilitas ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya dan tidak menimbulkan keraguan mengenai validitas temuan yang disajikan (Helaluddin & Wijaya, 2019). Untuk mencapai kredibilitas, peneliti menerapkan beberapa strategi, termasuk memperpanjang waktu keikutsertaan di lapangan dan meningkatkan kecermatan selama proses penelitian. (Suyitno, 2018).

Selain itu, triangulasi juga diterapkan, Triangulasi merupakan metode pengumpulan data yang mengintegrasikan berbagai teknik dan sumber data yang ada. Ketika peneliti menggunakan triangulasi, mereka tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga menguji kredibilitasnya dengan memverifikasi melalui berbagai teknik dan sumber yang berbeda. (Sugiyono, 2013). Dengan membandingkan data dari berbagai sumber, teknik pengumpulan data, dan waktu pengumpulan, untuk memastikan bahwa hasil penelitian mencerminkan kondisi nyata dan dapat diandalkan, Triangulasi dapat dilakukan dengan menggabungkan beberapa metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumen tertulis (Moleong, 2007). Dalam konteks penelitian ini, triangulasi membantu peneliti memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang efektivitas strategi penertiban dengan mengintegrasikan berbagai perspektif dan data yang dikumpulkan dari berbagai aspek di kawasan prostitusi Payo Sigadung.(Kurniawan & Sarmini, 2022)